FALA Jurnal Ilmiah Multidisipliner ISSN 3062-9403

PERENCANAAN STRATEGIS PROGRAM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN INDUSTRI DALAM MEMPERKUAT KEMITRAAN SEKOLAH DI SMKN 2 KEBUMEN

[1]Addy Purniawan
Email : *Purniawanaddy76@gmail.com*
Universitas K.H Abdul Chalim, Mojokerto

[2]Ammar Zainuddin
Email : *ammar@uac.ac.id*
[2]Universitas K.H Abdul Chalim, Mojokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan strategis program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri dalam memperkuat kemitraan sekolah di SMKN 2 Kebumen. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan utama kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program dilaksanakan pada awal tahun ajaran melalui penetapan struktur pengelola, koordinasi lintas bidang, dan penyelarasan dengan visi, misi, kalender pendidikan, serta kebutuhan kemitraan sekolah. Program telah mencakup tujuan, kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur pelaksanaan, dan evaluasi. Kekuatan perencanaan terlihat pada keterlibatan kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, kompetensi keahlian, Bursa Kerja Khusus, dan Unit Produksi dalam penyusunan serta pelaksanaan program. Namun, perencanaan masih perlu diperkuat pada aspek analisis kebutuhan, pemetaan pemangku kepentingan, perumusan indikator kinerja, analisis risiko, penyusunan standar operasional, dokumentasi evaluasi, dan pengukuran dampak kemitraan. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian fungsi hubungan masyarakat dan hubungan industri ke dalam kerangka perencanaan strategis yang menghubungkan komunikasi kelembagaan, koordinasi internal, kemitraan industri, dan relevansi lulusan. Penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan berbasis data, partisipasi, indikator terukur, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut diperlukan agar Humas dan Hubin berkembang menjadi fungsi strategis yang mendukung mutu pembelajaran, reputasi sekolah, keberlanjutan kemitraan, kompetensi peserta didik, serta keterserapan lulusan di dunia kerja. Implikasinya, sekolah perlu menyusun matriks perencanaan strategis terpadu yang memuat sasaran, penanggung jawab, anggaran, risiko, capaian, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Kata kunci: *perencanaan strategis; hubungan masyarakat dan industri; kemitraan sekolah*

Pendahuluan

Sekolah merupakan organisasi sosial yang berkembang melalui hubungan timbal balik dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai lembaga eksternal sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan kualitas kemitraan yang dibangun di lingkungan sekitarnya (Valli et al., 2018). Kemitraan yang dikelola secara efektif memungkinkan sekolah memperoleh dukungan sosial, sumber

daya, pengetahuan, keahlian, serta layanan yang tidak seluruhnya tersedia di dalam organisasi sekolah (Sanders, 2016). Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan juga dapat membentuk modal sosial yang memperluas kesempatan belajar sekaligus menjadikan pelayanan sekolah lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik (Galindo et al., 2017). Dengan demikian, sekolah perlu dipahami sebagai sistem terbuka yang secara berkelanjutan membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kewajiban sekolah tidak berhenti pada penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan komunikasi kelembagaan untuk menyampaikan program, pelayanan, capaian, dan perkembangan sekolah kepada masyarakat secara terencana (Afkarina, 2018). Hubungan sekolah dengan masyarakat juga menuntut adanya mekanisme untuk menyerap kebutuhan, harapan, aspirasi, kritik, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Umar, 2016). Dalam kerangka tersebut, hubungan masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara lembaga pendidikan dengan berbagai kelompok publik, seperti peserta didik, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (Hakim, 2019). Oleh karena itu, hubungan masyarakat perlu ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang mengelola komunikasi dua arah dan kepercayaan pemangku kepentingan, bukan sekadar unit publikasi, dokumentasi, atau pelaksana kegiatan seremonial.

Pengelolaan hubungan eksternal menjadi semakin kompleks pada sekolah menengah kejuruan karena tujuan pendidikan kejuruan menuntut adanya keterhubungan nyata antara program sekolah dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri (Lestari & Pardimin, 2019). Kerja sama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dapat dikembangkan melalui penyelarasan kompetensi, praktik kerja industri, pelibatan praktisi, pemanfaatan sarana industri, serta dukungan terhadap peningkatan mutu lulusan (Munthe & Mataputun, 2021). Praktik kerja industri yang dikelola secara sistematis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman kerja langsung, mengenal prosedur kerja, dan menyesuaikan kompetensinya dengan lingkungan industri (Sunardi, 2017). Selain itu, kurikulum sekolah menengah kejuruan perlu dirancang sebagai sarana pembentukan kompetensi dan budaya kerja yang sesuai dengan karakteristik dunia kerja (Sutjipto, 2019). Hubungan industri dengan demikian menjadi instrumen utama untuk menjaga relevansi pendidikan kejuruan dengan perkembangan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja.

Fungsi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri atau Humas dan Hubin pada sekolah menengah kejuruan memiliki cakupan yang lebih luas daripada kegiatan promosi karena melibatkan pengelolaan kerja sama sekolah dengan dunia kerja dalam berbagai program pendidikan kejuruan (Baitullah & Wagiran, 2019). Implementasi konsep *link and match* menunjukkan bahwa keterhubungan sekolah menengah kejuruan

dengan industri dapat mencakup penyusunan kurikulum bersama, pembelajaran berbasis proyek, guru tamu, magang, sertifikasi kompetensi, dan komitmen penyerapan lulusan (Ahmanda et al., 2022). Bursa Kerja Khusus sebagai bagian dari fungsi hubungan industri juga berperan mempertemukan lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri serta meningkatkan peluang kebekerjaan lulusan sekolah menengah kejuruan (Gea et al., 2022). Keberhasilan fungsi Humas dan Hubin karena itu sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah merancang program secara sistematis, partisipatif, realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan bagian dari manajemen strategik yang mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan mutu melalui analisis kondisi, penetapan sasaran, dan pemilihan strategi yang sesuai (Abin, 2017). Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memerlukan pengelolaan terpadu terhadap tujuan, sumber daya, proses pelaksanaan, dan pengendalian program agar setiap kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Tanjung et al., 2022). Perencanaan juga menjadi tahap penting dalam manajemen pengembangan kurikulum karena menentukan arah program, struktur kegiatan, pembagian tanggung jawab, penggunaan sumber daya, dan proses evaluasi yang akan dilaksanakan (Andini, 2019). Dengan demikian, perencanaan harus menjawab apa yang akan dilakukan, mengapa kegiatan diperlukan, siapa pelaksananya, kapan kegiatan dilaksanakan, sumber daya apa yang digunakan, dan bagaimana keberhasilannya dinilai.

Perencanaan program yang baik perlu diawali dengan analisis konteks dan kebutuhan organisasi, dilanjutkan dengan penilaian masukan atau sumber daya, pengendalian proses, serta penentuan hasil yang akan dievaluasi (Mahmudi, 2011). Pelibatan komite sekolah dan unsur masyarakat juga penting untuk menghadirkan dukungan, pengawasan, pertimbangan, dan masukan terhadap program yang akan diselenggarakan oleh sekolah (Megiati, 2016). Manajemen strategik pendidikan menuntut adanya penyesuaian secara berkelanjutan antara kekuatan dan kelemahan internal organisasi, perubahan lingkungan eksternal, tujuan kelembagaan, dan strategi peningkatan mutu yang diterapkan (Abin, 2017). Rangkaian tahapan tersebut mencegah program menjadi sekadar pengulangan agenda tahunan dan mengarahkannya pada kebutuhan nyata serta kondisi objektif organisasi.

Pada tingkat praktik, manajemen hubungan masyarakat yang strategis seharusnya berorientasi pada pembentukan identitas, citra, dan kepercayaan publik melalui program yang dirancang secara sadar, bukan hanya melalui kegiatan komunikasi yang bersifat rutin (Sholihah, 2018). Pada pendidikan kejuruan, kualitas program hubungan industri juga perlu dilihat dari kontribusinya terhadap pelaksanaan praktik industri, penguasaan keterampilan, penyediaan informasi dunia kerja, dan peningkatan kesiapan kerja peserta didik (Khoiroh & Prajanti, 2019). Evaluasi yang hanya memeriksa keterlaksanaan kegiatan belum memadai karena evaluasi program pendidikan perlu mencakup kesesuaian konteks, kecukupan masukan, kualitas proses,

serta hasil yang dicapai oleh program (Mahmudi, 2011). Akibatnya, keberhasilan program Humas dan Hubin perlu dinilai melalui kualitas hubungan, kepuasan pemangku kepentingan, keberlanjutan kemitraan, peningkatan kompetensi, dan penyerapan lulusan, bukan hanya berdasarkan selesainya kegiatan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai bagaimana sekolah merencanakan program Humas dan Hubin. SMKN 2 Kebumen dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki struktur Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri yang menjalankan fungsi komunikasi, promosi sekolah, pengembangan kemitraan, pengelolaan hubungan dengan industri, unit produksi, dan Bursa Kerja Khusus. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana proses perencanaan program Humas dan Hubin di SMKN 2 Kebumen dan aspek apa saja yang perlu diperkuat agar perencanaan tersebut lebih strategis, terukur, dan berkelanjutan? Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis proses penetapan struktur pengelola, mekanisme penyusunan program, keterlibatan unsur sekolah, keselarasan program dengan visi dan misi, penentuan kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur pelaksanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi program Humas dan Hubin di SMKN 2 Kebumen.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Permatasari dan Jubaedah (2026) berjudul *Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Link and Match Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri di Kota Bandung* menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di SMK Pasundan 1 Bandung dan menemukan bahwa pelaksanaan *link and match* masih terhambat oleh perbedaan pemahaman antara sekolah dan industri, belum optimalnya sinkronisasi kurikulum, keengganan industri untuk terikat dalam kerja sama formal, ketidaksesuaian kompetensi peserta didik, serta rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan (Permatasari & Jubaedah, 2026). Penelitian tersebut menekankan tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada perencanaan strategis program Humas dan Hubin sebagai tahap awal pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia industri.

Penelitian Effendi dan Nurjanah (2025) berjudul *Public Relations Management in Enhancing the Collaboration Between SMK Negeri 6 Malang City and the Industrial Sector* menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen serta menemukan bahwa humas berperan menjembatani kebutuhan sekolah dengan dunia industri melalui kelas industri, bursa kerja, komunikasi strategis, dan pemeliharaan kemitraan yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan teknis, keterampilan sosial, pengalaman praktis, serta reputasi sekolah (Effendi & Nurjanah, 2025). Penelitian tersebut membahas manajemen humas secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis proses penyusunan tujuan,

kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur, dan perangkat evaluasi program Humas dan Hubin.

Penelitian Muharam, Afrilia, dan Sudarma (2025) berjudul *Integrating Vocational Education and Industry through Public Policy: Towards Excellent and Competitive Human Capital* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur dan menunjukkan bahwa integrasi pendidikan vokasi dengan industri dapat dikembangkan melalui lima pendekatan, yaitu perancangan bersama, pembelajaran bersama, pelatihan bersama, penilaian bersama, dan perekrutan bersama, sedangkan kebijakan publik berperan sebagai fasilitator sekaligus regulator dalam membentuk ekosistem kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (Muharam et al., 2025). Penelitian tersebut berorientasi pada integrasi kebijakan pendidikan vokasi secara makro, sedangkan penelitian ini mengkaji perencanaan program pada tingkat satuan pendidikan secara langsung.

Penelitian Tessa dan Humaedi (2024) berjudul *Upaya Menguatkan Link and Match melalui Program SMK Pusat Keunggulan: Studi Kasus SMKN 1 Bantul* menggunakan pendekatan kualitatif etnografis dan menemukan bahwa persoalan ketidaksesuaian pendidikan dengan pekerjaan tidak hanya disebabkan keterbatasan sarana, tetapi juga lemahnya penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, sedangkan penerapan sistem *link and match* memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kompetensi dan kewirausahaan lulusan sesuai bidang keahliannya (Tessa & Humaedi, 2024). Penelitian tersebut berfokus pada keberhasilan Program SMK Pusat Keunggulan dalam mengurangi ketidaksesuaian kompetensi, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses manajerial yang mendasari penyusunan program hubungan masyarakat dan hubungan industri.

Penelitian Abdillah dan Puspitasari (2024) berjudul *Kurikulum Kerjasama sebagai Upaya Penguatan Kompetensi SMK Pusat Keunggulan* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa penguatan kompetensi peserta didik dilakukan melalui penyelarasan kurikulum bersama industri, pembelajaran berbasis proyek, pelibatan guru dari industri, dan pelaksanaan *teaching factory* sebagai bentuk penerapan hubungan sekolah dengan dunia kerja (Abdillah & Puspitasari, 2024). Penelitian tersebut menempatkan kurikulum kerja sama sebagai instrumen penguatan kompetensi, sedangkan penelitian ini menempatkan Humas dan Hubin sebagai unit strategis yang merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi berbagai bentuk hubungan eksternal sekolah.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, kajian terdahulu lebih banyak membahas implementasi *link and match*, kolaborasi sekolah dengan industri, kebijakan pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum, dan dampak kemitraan terhadap kompetensi lulusan, tetapi belum secara khusus menguraikan perencanaan strategis program Humas dan Hubin yang meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pelibatan pemangku

kepentingan, penyusunan kegiatan, pengalokasian sumber daya, penentuan prosedur, perumusan indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan kejuruan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai hubungan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri umumnya berfokus pada implementasi *link and match*, penyelarasan kurikulum, pelaksanaan kelas industri, praktik kerja lapangan, *teaching factory*, bursa kerja khusus, dan pengaruh kemitraan terhadap peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja lulusan. Meskipun beberapa penelitian telah membahas peran humas dalam membangun kolaborasi sekolah dengan industri, kajian tersebut belum secara mendalam menganalisis perencanaan program Humas dan Hubin sebagai proses manajerial yang mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pelibatan unsur organisasi, penyusunan kegiatan dan jadwal, pengalokasian sumber daya, penentuan prosedur, perumusan indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian fungsi hubungan masyarakat dan hubungan industri ke dalam satu kerangka perencanaan strategis di sekolah menengah kejuruan yang tidak hanya berorientasi pada publikasi dan pelaksanaan kegiatan kemitraan, tetapi juga pada koordinasi lintas bidang, keselarasan dengan visi dan misi sekolah, keterukuran kinerja program, keberlanjutan kerja sama, dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan serta relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses perencanaan program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri dalam kondisi alamiah sekolah. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menggali makna, pengalaman, pola koordinasi, dan praktik organisasi melalui interaksi langsung dengan informan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di SMKN 2 Kebumen dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam perencanaan program, yaitu Nurul Aini selaku kepala sekolah dan Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan program, pembagian tugas, koordinasi lintas bidang, pembiayaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan berdasarkan tema perencanaan program, kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan lapangan dan konsep manajemen pendidikan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan kepala sekolah dan

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen program sekolah (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Organisasi dan Proses Perencanaan Program Humas dan Hubin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri di SMKN 2 Kebumen diawali dengan penetapan struktur pengelola pada awal tahun ajaran. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menunjuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta pengalaman personel yang akan diberikan tanggung jawab. Berdasarkan wawancara dengan Purwanto pada 5 Maret 2023, penunjukan wakil kepala sekolah dilakukan bersamaan dengan rapat penyusunan struktur dan program kerja sekolah, sedangkan masa jabatan berlangsung secara periodik selama kurang lebih tiga tahun. Keterangan tersebut diperkuat oleh Nurul Aini dalam wawancara pada 7 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa penetapan struktur dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program.

Penetapan struktur pengelola merupakan bagian penting dalam proses pengorganisasian karena setiap personel harus memahami kedudukan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Pembagian tugas yang jelas dapat memudahkan koordinasi, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Badrudin (2014) menjelaskan bahwa pengorganisasian diperlukan untuk membagi pekerjaan, menetapkan hubungan kerja, dan mengoordinasikan sumber daya agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dengan demikian, keberadaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin bukan hanya sebagai jabatan administratif, tetapi sebagai unsur strategis yang mengoordinasikan komunikasi sekolah dengan masyarakat dan dunia industri. Perencanaan program Humas dan Hubin dilaksanakan pada awal tahun ajaran dan menjadi bagian dari perencanaan program sekolah secara keseluruhan. Proses perencanaan tidak dilakukan secara individual, tetapi melibatkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, kepala kompetensi keahlian, Bursa Kerja Khusus, Unit Produksi, serta unsur lain yang berkaitan dengan kegiatan hubungan eksternal. Keterlibatan lintas bidang diperlukan karena sebagian besar program Humas dan Hubin memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik, pembinaan peserta didik, penggunaan fasilitas, penyaluran lulusan, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Koordinasi dengan bidang kurikulum, misalnya, dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan praktik kerja lapangan, sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, kelas industri, guru tamu, penerimaan peserta didik baru, dan kegiatan promosi dengan kalender pendidikan. Sementara itu, koordinasi dengan bidang kesiswaan dan kompetensi keahlian diperlukan dalam penyiapan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan bersama mitra

industri. Pola perencanaan lintas fungsi tersebut menunjukkan bahwa program Humas dan Hubin dipahami sebagai program kelembagaan yang membutuhkan dukungan seluruh unsur sekolah.

Mulyasa (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah yang efektif membutuhkan partisipasi, koordinasi, keterbukaan, dan pembagian tanggung jawab di antara unsur-unsur sekolah. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan berbagai bidang dalam penyusunan program merupakan kekuatan karena dapat menyelaraskan kegiatan hubungan masyarakat, pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik, dan kemitraan industri. Perencanaan kolaboratif juga dapat mengurangi benturan jadwal, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperjelas kontribusi masing-masing unit terhadap pencapaian tujuan sekolah. Program Humas dan Hubin juga disusun dengan mengacu pada visi dan misi SMKN 2 Kebumen. Keselarasan tersebut terlihat dari tujuan program yang diarahkan untuk membangun citra positif sekolah, menyampaikan informasi kepada masyarakat, memperluas jaringan kemitraan, mendukung peningkatan mutu pembelajaran, serta mempersiapkan lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan Humas dan Hubin tidak ditempatkan sebagai aktivitas tambahan, tetapi sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan kelembagaan.

Meskipun demikian, keselarasan program dengan visi dan misi perlu diterjemahkan ke dalam tujuan operasional dan indikator yang terukur. Rumusan seperti meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat atau memperkuat kerja sama dengan industri masih bersifat umum apabila tidak disertai ukuran keberhasilan. Tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi jumlah mitra aktif, jumlah program bersama industri, keterlibatan praktisi industri dalam pembelajaran, peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti praktik kerja lapangan, tingkat kepuasan mitra, dan persentase lulusan yang terserap dalam dunia kerja.

2. Pelaksanaan, Koordinasi, dan Evaluasi Program Humas dan Hubin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program Humas dan Hubin di SMKN 2 Kebumen telah mencakup beberapa unsur pokok, yaitu tujuan, kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur pelaksanaan, dan evaluasi. Unsur tersebut sejalan dengan pendapat Iriantara (2013) yang menjelaskan bahwa perencanaan hubungan masyarakat perlu memuat tujuan yang akan dicapai, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber daya yang digunakan, prosedur kerja, serta perangkat evaluasi. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki dasar perencanaan yang sistematis, meskipun beberapa bagian masih perlu diperkuat agar lebih terukur.

Tujuan program Humas dan Hubin diarahkan pada dua fungsi utama. Pertama, fungsi komunikasi dan reputasi, yaitu memperkenalkan program, prestasi, layanan, dan keunggulan sekolah kepada masyarakat. Kedua, fungsi kemitraan, yaitu mengembangkan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung

pembelajaran, praktik kerja lapangan, pengembangan kompetensi, sertifikasi, perekrutan lulusan, serta penyesuaian kompetensi peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja. Ruslan (2016) menjelaskan bahwa hubungan masyarakat memiliki fungsi membangun komunikasi dua arah, menciptakan pengertian bersama, serta membentuk hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya.

Kegiatan Humas dan Hubin dilaksanakan melalui berbagai unit dan kelompok kerja, seperti Bursa Kerja Khusus, Unit Produksi, kompetensi keahlian, tim promosi, serta pengelola kerja sama industri. Kegiatan yang direncanakan mencakup pelayanan informasi, promosi sekolah, penerimaan peserta didik baru, praktik kerja lapangan, kunjungan industri, penyelarasan kurikulum, pelaksanaan kelas industri, perekrutan lulusan, penelusuran alumni, dan pengembangan kerja sama dengan mitra. Pembagian kegiatan berdasarkan unit kerja dapat membantu pemusatan tanggung jawab, tetapi harus disertai mekanisme koordinasi agar setiap unit tidak bekerja secara terpisah.

Jadwal kegiatan disusun dengan mengacu pada kalender pendidikan dan karakteristik masing-masing program. Kegiatan yang melibatkan pihak luar membutuhkan ketepatan waktu karena perubahan jadwal tidak hanya memengaruhi sekolah, tetapi juga masyarakat, orang tua, peserta didik, dan mitra industri. Oleh karena itu, penyusunan kalender kegiatan terpadu menjadi penting agar seluruh bidang dapat mengetahui waktu pelaksanaan, penanggung jawab, mitra yang terlibat, serta kebutuhan sumber daya setiap kegiatan.

Sumber daya program meliputi anggaran, tenaga pelaksana, waktu, fasilitas, informasi, jaringan kemitraan, dan dukungan pimpinan. Pembiayaan kegiatan berasal dari anggaran sekolah berdasarkan program yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah mempertimbangkan sumber daya material dan nonmaterial. Namun, pengalokasian sumber daya perlu didasarkan pada prioritas dan potensi dampak program terhadap mutu pendidikan, kompetensi peserta didik, dan penyerapan lulusan.

Prosedur penyusunan program dimulai dari perancangan kegiatan oleh anggota Humas dan Hubin, pembahasan bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin, koordinasi dengan bidang terkait, serta pengajuan kepada kepala sekolah untuk memperoleh persetujuan. Alur tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian dan pembagian kewenangan. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan, sedangkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin bertindak sebagai koordinator yang memastikan program sesuai dengan tujuan dan kebijakan sekolah.

Prosedur tersebut perlu diperkuat melalui standar operasional yang tertulis. Standar operasional dapat mengatur tahapan pengajuan kerja sama, pemetaan calon mitra, verifikasi kesesuaian mitra, penyusunan nota kesepahaman, penempatan peserta

didik, pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Keberadaan prosedur tertulis dapat menciptakan konsistensi pelayanan dan mengurangi ketergantungan pada pengalaman personal pengelola program. Koordinasi dilakukan sebelum dan setelah kegiatan. Koordinasi sebelum kegiatan bertujuan memastikan kesiapan personel, pembagian tugas, jadwal, perlengkapan, pembiayaan, komunikasi dengan mitra, dan dokumen administratif. Koordinasi setelah kegiatan digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan, hambatan pelaksanaan, penyimpangan dari rencana, tanggapan mitra, dan kebutuhan perbaikan. Pola tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Evaluasi program telah digunakan untuk menilai keterlaksanaan kegiatan, tetapi masih cenderung berorientasi pada penyelesaian aktivitas. Evaluasi yang hanya mencatat bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan belum dapat menggambarkan manfaat dan dampaknya terhadap sekolah. Iriantara (2013) menegaskan bahwa evaluasi hubungan masyarakat diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan menjadi dasar dalam memperbaiki program berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi perlu mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak program. Indikator evaluasi dapat mencakup jumlah dan keberlanjutan mitra aktif, kesesuaian mitra dengan kompetensi keahlian, keterlibatan praktisi industri dalam pembelajaran, tingkat kepuasan peserta didik dan mitra, efektivitas media komunikasi, kualitas pelayanan informasi, jumlah lulusan yang direkrut industri, serta kontribusi program kemitraan terhadap mutu pembelajaran. Penggunaan indikator yang terukur akan membantu sekolah membedakan antara program yang sekadar terlaksana dan program yang benar-benar memberikan manfaat.

3. Kekuatan, Kelemahan, dan Penguatan Perencanaan Strategis Humas dan Hubin

Perencanaan program Humas dan Hubin di SMKN 2 Kebumen memiliki beberapa kekuatan. Pertama, perencanaan dilakukan secara periodik pada awal tahun ajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kalender akademik dan prioritas sekolah. Kedua, penyusunan program melibatkan berbagai unsur organisasi sehingga memperkuat koordinasi lintas bidang. Ketiga, program diarahkan untuk mendukung visi dan misi sekolah, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan perluasan kemitraan dengan dunia industri. Keempat, perencanaan telah mencakup tujuan, kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur, dan evaluasi. Kelima, koordinasi dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan sehingga sekolah memiliki mekanisme pencegahan dan perbaikan program.

Kekuatan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah membangun dasar pengelolaan program yang cukup sistematis. Hubungan masyarakat dan hubungan industri tidak hanya dipahami sebagai kegiatan publikasi, tetapi juga mencakup pengembangan jaringan, pelayanan informasi, penguatan pembelajaran, penyaluran

lulusan, serta kerja sama dengan dunia kerja. Suryosubroto (2012) menjelaskan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara terencana agar dapat menciptakan kerja sama, memperoleh dukungan publik, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Meskipun memiliki sejumlah kekuatan, penelitian menemukan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Pertama, penyusunan program belum sepenuhnya didahului oleh analisis kebutuhan yang sistematis. Program yang disusun berdasarkan kegiatan rutin berpotensi kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan peserta didik, orang tua, alumni, masyarakat, dan industri. Analisis kebutuhan diperlukan agar kegiatan yang direncanakan benar-benar berangkat dari persoalan dan kebutuhan nyata.

Kedua, pemetaan pemangku kepentingan belum dilakukan secara terstruktur. Sekolah memiliki publik yang beragam, seperti peserta didik, orang tua, alumni, masyarakat, pemerintah, perusahaan, lembaga sertifikasi, organisasi profesi, dan media. Setiap kelompok memiliki kepentingan, pengaruh, kebutuhan informasi, dan potensi kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, strategi komunikasi dengan orang tua tidak dapat disamakan dengan strategi komunikasi kepada perusahaan atau lembaga sertifikasi. Ketiga, tujuan dan indikator kinerja program masih dirumuskan secara umum. Ketiadaan indikator yang spesifik dapat menyulitkan sekolah dalam menilai keberhasilan program. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak. Sebagai contoh, keberhasilan program kerja sama industri tidak hanya diukur dari jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani, tetapi juga dari keaktifan program bersama, keterlibatan industri dalam pembelajaran, peningkatan kompetensi peserta didik, dan penyerapan lulusan.

Keempat, analisis risiko belum menjadi bagian yang kuat dalam proses perencanaan. Program yang melibatkan pihak eksternal memiliki risiko berupa perubahan jadwal, pembatalan kerja sama, keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian tempat praktik, perbedaan harapan, keselamatan peserta didik, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Setiap risiko perlu dipetakan berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya, kemudian disertai langkah pencegahan serta rencana alternatif. Kelima, dokumentasi dan tindak lanjut hasil evaluasi masih perlu diperkuat. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kekurangan, tetapi juga untuk mendokumentasikan praktik baik yang dapat diterapkan kembali. Hasil evaluasi harus dituangkan dalam rekomendasi dan menjadi dasar penyusunan program pada tahun berikutnya. Tanpa dokumentasi yang baik, kelemahan yang sama dapat terulang dan keberhasilan program sulit dikembangkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan perencanaan program Humas dan Hubin dapat dilakukan melalui delapan tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah audit kondisi awal dengan mengevaluasi program sebelumnya, kualitas hubungan dengan mitra, efektivitas media komunikasi, tingkat penyerapan lulusan, dan ketersediaan sumber daya. Tahapan kedua adalah pemetaan pemangku kepentingan

berdasarkan kepentingan, pengaruh, kebutuhan informasi, dan potensi kontribusinya. Tahapan ketiga adalah penetapan tujuan serta indikator yang spesifik dan terukur. Tahapan keempat adalah penyusunan program yang memuat nama kegiatan, sasaran, penanggung jawab, mitra, jadwal, sumber daya, indikator, risiko, dan bukti keberhasilan. Tahapan kelima adalah pelaksanaan komunikasi dan kemitraan secara dua arah dengan membuka ruang bagi masukan dan partisipasi pemangku kepentingan. Tahapan keenam adalah monitoring berkala untuk mengetahui perkembangan program dan melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan. Tahapan ketujuh adalah evaluasi hasil dan dampak program, sedangkan tahapan kedelapan adalah penyusunan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan, pengembangan, penghentian, atau keberlanjutan program.

Model penguatan tersebut menempatkan perencanaan program sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya kegiatan administratif pada awal tahun ajaran. Perencanaan yang baik harus didasarkan pada data, diarahkan pada tujuan yang terukur, melibatkan pemangku kepentingan, memperhitungkan risiko, dan dilanjutkan dengan monitoring serta evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, program Humas dan Hubin dapat berfungsi lebih strategis dalam membangun reputasi sekolah, memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas kemitraan industri, dan mendukung kesiapan kerja lulusan.

Kesimpulan

Perencanaan program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri di SMKN 2 Kebumen dilakukan pada awal tahun ajaran melalui koordinasi antara kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan unit kerja lainnya. Penetapan pengelola dilakukan oleh kepala sekolah dengan masa jabatan periodik. Pola penyusunan program yang melibatkan berbagai bidang telah membentuk sinergi, komunikasi internal, dan keselarasan kegiatan dengan kalender pendidikan serta visi dan misi sekolah.

Perencanaan program telah mencakup enam komponen utama, yaitu tujuan, kegiatan, jadwal, sumber daya, prosedur pelaksanaan, dan perangkat evaluasi. Tujuan program diarahkan pada promosi sekolah, pembangunan hubungan dengan masyarakat dan industri, serta peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan program juga didukung koordinasi sebelum dan sesudah kegiatan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

Meskipun demikian, perencanaan masih memerlukan penguatan pada analisis kebutuhan, pemetaan pemangku kepentingan, perumusan indikator kinerja, analisis risiko, standar operasional, dokumentasi evaluasi, dan pengukuran dampak kemitraan. Penguatan tersebut diperlukan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai berdasarkan terlaksananya kegiatan, tetapi juga berdasarkan perubahan kualitas hubungan, kontribusi mitra terhadap pembelajaran, peningkatan kompetensi peserta didik, dan keterserapan lulusan. Sekolah disarankan menyusun matriks perencanaan

Humas dan Hubin yang memuat tujuan, sasaran, indikator, kegiatan, penanggung jawab, mitra, jadwal, anggaran, risiko, hasil, dan tindak lanjut. Evaluasi program juga perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan peserta didik, orang tua, alumni, masyarakat, dan mitra industri. Melalui perencanaan berbasis data, kemitraan, dan kinerja, fungsi Humas dan Hubin dapat berkembang dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis dalam peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan.

Daftar Pustaka

Abdillah, L. R., & Puspitasari, F. F. (2024). Kurikulum kerjasama sebagai upaya penguatan kompetensi SMK Pusat Keunggulan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10*(1), 426–432. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1225

Abin, M. R. (2017). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 5*(1), 87–102. https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.87-102

Afkarina, N. I. (2018). Strategi komunikasi humas dalam membentuk *public opinion* lembaga pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 2*(1). https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i1.5124

Ahmanda, W., Maulana, A., Murtinugraha, R. E., & Arifah, S. (2022). Implementasi program SMK Pusat Keunggulan dilihat dari konsep 8+i *link and match*. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan, 2*(2). https://doi.org/10.17509/jptb.v2i2.51290

Andini, G. T. (2019). Manajemen pengembangan kurikulum. *Isema: Jurnal Islamic Education Manajemen, 3*(2). https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5008

Badrudin. (2014). *Dasar-dasar manajemen*. Alfabeta.

Baitullah, M. J. A., & Wagiran. (2019). Cooperation between vocational high schools and world of work: A case study at SMK Taman Karya Madya Tamansiswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi, 9*(3). https://doi.org/10.21831/jpv.v9i3.27719

Effendi, M. I., & Nurjanah, L. (2025). Public relations management in enhancing the collaboration between SMK Negeri 6 Malang City and the industrial sector. *Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan, 5*(1), 51–61. https://doi.org/10.12928/jimp.v5i1.13108

Galindo, C., Sanders, M. G., & Abel, Y. (2017). Transforming educational experiences in low-income communities: A qualitative case study of social capital in a full-service community school. *American Educational Research Journal, 54*(1_suppl), 140S–163S. https://doi.org/10.3102/0002831216676571

Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi. (2022). The effectiveness of the role of the Special Job Fair SMK SMTI Banda Aceh in enhancing graduates' employability to the business/industry world. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 5*(1). https://doi.org/10.22373/jp.v5i1.12160

Hakim, M. N. (2019). Manajemen hubungan masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan: Studi kasus di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4*(1), 121–139. https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.245

Iriantara, Y. (2013). *Manajemen humas sekolah*. Simbiosa Rekatama Media.

Khoiroh, M., & Prajanti, S. D. W. (2019). Pengaruh motivasi kerja, praktik kerja industri, penguasaan *soft skill*, dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja siswa SMK. *Economic Education Analysis Journal, 7*(3). https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28336

Lestari, B. W., & Pardimin. (2019). Manajemen kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. *Media Manajemen Pendidikan, 2*(1). https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3652

Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *At-Ta'dib, 6*(1). https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551

Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan komite sekolah: Kajian konsep dan implementasinya. *SAP: Susunan Artikel Pendidikan, 1*(2). https://doi.org/10.30998/sap.v1i2.1019

Muharam, R. S., Afrilia, U. A., & Sudarma. (2025). Integrating vocational education and industry through public policy: Towards excellent and competitive human capital. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts, 4*(2), 65–74. https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v4i2.6097

Mulyasa, E. (2014). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.

Munthe, F., & Mataputun, Y. (2021). Analisis kerja sama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan. *JPPI: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. https://doi.org/10.29210/020211479

Permatasari, N., & Jubaedah, E. (2026). Strategi *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan *link and match* jenjang sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) di Kota Bandung: Studi kasus di SMK Pasundan 1 Bandung. *Jurnal Media Administrasi Terapan, 6*(2), 65–78. https://doi.org/10.31113/jmat.v6i2.121

Ruslan, R. (2016). *Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsepsi dan aplikasi*. Rajawali Pers.

Sanders, M. G. (2016). Leadership, partnerships, and organizational development: Exploring components of effectiveness in three full-service community schools. *School Effectiveness and School Improvement, 27*(2), 157–177. https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1030432

Sholihah, T. (2018). Strategi manajemen humas dalam menciptakan *school branding* pada sekolah Islam terpadu. *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3*(2). https://doi.org/10.18860/jmpi.v3i2.6455

Sunardi. (2017). Pengelolaan praktik kerja industri di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 12*(1). https://doi.org/10.23917/jmp.v12i1.2968

Suryosubroto, B. (2012). *Hubungan sekolah dengan masyarakat: School public relations*. Rineka Cipta.

Sutjipto. (2019). Perancangan kurikulum sekolah menengah kejuruan sebagai pranata budaya kerja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4*(1). https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1219

Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser, 6*(1). https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481

Tessa, A., & Humaedi, M. A. (2024). Upaya menguatkan *link and match* melalui Program SMK Pusat Keunggulan: Studi kasus SMKN 1 Bantul. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 16*(2). https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.751

Umar, M. (2016). Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 2*(1), 18–29. https://doi.org/10.22373/je.v2i1.688

Valli, L., Stefanski, A., & Jacobson, R. (2018). Typologizing school–community partnerships: A framework for analysis and action. *Urban Education, 53*(6), 719–747. https://doi.org/10.1177/0042085915610180